

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ACEH
TENGGERA DI TAHUN 2017-2021**



Oleh:

Nama : Noviana Wulandari

NIM : 19312427

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ACEH
TENGGERA TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Noviana Wulandari

NIM : 19312427

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Peneliti



(Noviana Wulandari)

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ACEH
TENGGERA TAHUN 2017-2021**



Yogyakarta, 9 Januari 2023
Disetujui

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umi Sulistiyanti', is positioned below the approval text.

(Umi Sulistiyanti, SE., M.Acc, Ak)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021

Disusun oleh : NOVIANA WULANDARI

Nomor Mahasiswa : 19312427

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Rabu, 01 Februari 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.

Penguji : Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA.


.....
.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.



HALAMAN MOTTO

“Never give up, if you can’t do it, practice more until you can”

(Win Metawin Opas-iamkajorn)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-NYA. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga atas berkat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021”**.

Dalam perjalanan studi dan penyusunan skripsi penulis memperoleh banyak dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, mulai dari tenaga, doa dan motivasi. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Syafri Rachmad dan Ibunda Risma Wello selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan harapan, dukungan, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus.
2. Ayahanda Letda Agus M. selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan harapan, dukungan, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus.

3. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Umi Sulistiyanti, SE., M.Acc, Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan dengan sabar telah membimbing dengan ilmu, saran, serta nasihat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar, serta atas ilmu yang diberikan semoga bermanfaat di kemudian hari
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Akbar, Indira, dan Panji selaku saudara-saudara penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat sehingga akhir studi ini.
8. Kepada Bapak Drs. H. Raidin Pinim, M.AP yang telah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam mendapatkan sumber data.
9. Gegoh Mustawa Madya yang telah memberikan semangat, kontribusi, kebahagiaan setiap harinya, juga bersedia mendengar keluh kesah dan memberikan motivasi kepada penulis.
10. Kepada Do Kyungsoo dan seluruh member Exo, Bright Vachirawit dan Win Metawin yang telah memberikan kebahagiaan atas karya-karyanya sehingga memberi motivasi dan inspirasi kepada penulis.

11. Kepada Meutia Bestannisa Widyazzahra, terima kasih telah berbagi sukacita, memberi semangat dan selalu membantu saya dalam segala hal sehingga penulis mampu mengerjakan penelitian ini.
12. Teman-teman saya (Anisah Abni, Maulida Kamal Gusman, Citra SetyaRafifa, Nurul Magfira A.P.C, Tri Harsanti Mursyid, Sofia Ayu R, Audita Shasabila) yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
13. Kepada teman Kost Danish (Ulfa dan Yuan) yang telah memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada penulis.
14. Terima kasih teruntuk semua teman-temanku yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, Motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan serta jauh dari sempurna, dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Kritik dan saran yang membangun, diharapkan untuk perkembangan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

Yogyakarta,

Peneliti

Noviana Wulandari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan PKB. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menggunakan data sekunder. Data yang diolah adalah data penerimaan PKB dan PAD periode 2017-2021 yang didapatkan dari UPT. SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menghitung tingkat efektivitas realisasi penerimaan PKB dan tingkat kontribusi PKB terhadap PAD. Berdasarkan dari hasil penelitian, selama periode 2017-2021 rata-rata tingkat efektivitas realisasi penerimaan PKB sebesar 120,99%, dan kontribusi PKB terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 6,83%. Di samping tingginya tingkat efektivitas penerimaan PKB namun terdapat hambatan dalam penerimaan PKB akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor. Langkah-langkah yang diberikan pihak SAMSAT terhadap hambatan penerimaan PKB dengan mengimbau dan meningkatkan masyarakat secara berkelanjutan untuk patuh dalam pembayaran PKB untuk tercapainya target dan realisasi yang telah ditetapkan pemerintah.

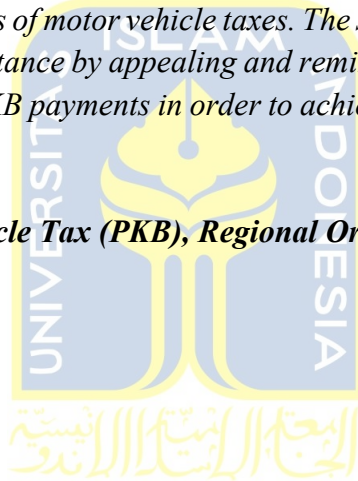
Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)



ABSTRACT

This research aims to analyze and determine the contribution of Motor Vehicle Tax (PKB) to Regional Original Revenue (PAD), as well as factors that hinder the implementation of PKB collection. This type of research is quantitative with a descriptive approach and uses secondary data. The data processed is PKB and PAD revenue data for the 2017-2021 period obtained from UPT SAMSAT Southeast Aceh Regency and the Regional Financial Management Board of Southeast Aceh Regency. This research uses data analysis by calculating the level of effectiveness of PKB revenue realization and the level of contribution of PKB ro. PAD. Based on the results of the research, the average level of effectiveness of PKB revenue realization during the 2017-2021 period was 120.99%, and the contribution to PAD with an average of 6.83%. In addition to the high level of effectiveness in PKB acceptance, there are obstacles in collecting PKB due to the lack of public awareness of motor vehicle taxes. The steps taken by SAMSAT against obstacles to PKB acceptance by appealing and reminding the public on an ongoing basis to comply with PKB payments in order to achieve the targets and realizations set by the government.

Keywords: Motor Vehicle Tax (PKB), Regional Original Revenue (PAD)



DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i>	<i>i</i>
<i>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</i>	<i>ii</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i>	<i>iii</i>
<i>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</i>	<i>iv</i>
<i>HALAMAN MOTTO</i>	<i>v</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>vi</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>ix</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>x</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>xi</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>xiv</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Pajak	12
2.1.1 Pengertian Pajak.....	12
2.1.2 Fungsi Pajak	13
2.2 Pajak Daerah	13
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor	15
2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	15
2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
2.3.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor .	17
2.4 Kontribusi	18
2.5 Pendapatan Asli Daerah	19
2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
2.5.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19
2.6 Penelitian Terdahulu	20
2.7 Kerangka Konsep	25
BAB III METODE PENELITIAN	27

3.1	Jenis Penelitian	27
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.2.1	Lokasi	27
3.2.2	Waktu Penelitian	27
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran	27
3.3.1	Variabel Dependen (Pendapatan Asli Daerah)	28
3.3.2	Variabel Independen (Pajak Kendaraan Bermotor)	28
3.4	Objek Penelitian	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5.1	Dokumentasi	29
3.5.2	Studi Pustaka.....	29
3.5.3	Wawancara	30
3.6	Teknik Analisis Data.....	30
3.6.1	Analisis Efektivitas	30
3.6.2	Analisis Kontribusi.....	31
<i>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</i>		33
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	33
4.1.1	Geografis	33
4.2	Hasil Penelitian.....	33
4.2.1	Sebaran kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara.....	33
4.2.2	Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor.....	34
4.2.3	Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021.....	36
4.3	Hasil dan Pembahasan.....	38
4.3.1	Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.....	38
4.3.2	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	40
4.3.3	Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara	42
<i>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</i>		45
5.1	Kesimpulan	45
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	46
5.3	Saran Penelitian	46
5.4	Implikasi Penelitian	47
<i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>		48
<i>LAMPIRAN.....</i>		50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021	5
Tabel 1. 2 Denda Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021	6
Tabel 2. 1 Talaah Kajian Terdahulu.....	21
Tabel 3. 1 Kriteria Efektifitas.....	31
Tabel 3. 2 Kriteria Kontribusi	32
Tabel 4. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara	34
Tabel 4. 2 Kriteria Efektivitas.....	35
Tabel 4. 3 Target Penerimaan, Realisasi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021	35
Tabel 4. 4 Kriteria Kontribusi	37
Tabel 4. 5 Realisasi PKB dan Tingkat Kontribusi PKB Terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021.....	38
Tabel 4. 6 Hasil Wawancara Tahun 2022	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	26
---------------------------------------	----



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang dalam berbagai bidang, seperti politik, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sosial. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan bangsa negara. Mewujudkan tujuan mencerdaskan bangsa dan negara dengan cara menyediakan ketersediaan pendanaan untuk sumber daya manusia yang unggul. Dalam menyediakan pendanaan ini, salah satunya dengan cara memperhatikan pembangunan ekonomi negaranya. Dengan adanya pembangunan ekonomi yang sangat baik akan memberikan banyak manfaat bagi suatu negara. Pembangunan ekonomi yang baik dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga dapat menciptakan pemerataan pembangunan dari pusat hingga daerah.

Pembangunan ekonomi tentu memiliki tujuan baik jangka panjang dan jangka pendek. Berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 pembangunan ekonomi tentunya dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Tak hanya itu tujuan jangka panjang lainnya untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu juga tahapan pembangunan berikutnya dapat meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan bagi masyarakat baik di pusat maupun di daerah. Maka dari itu pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan di berbagai tempat, baik di pusat hingga di daerah.

Pembangunan daerah dapat dilakukan dengan kebijakan desentralisasi oleh pemerintah pusat. Desentralisasi merupakan pemberian wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk dapat mengatur juga mengurus pemerintah masing-masing daerah, termasuk penyelenggaraan keuangan daerah dan kekayaan daerah. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah mengharapkan agar pemerintah daerah dapat memperbaiki sosial ekonomi di daerah dan meningkatkan pendapatan asli di daerah dalam berbagai bidang, termasuk dengan melakukan pemungutan pajak daerah masing-masing.

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh Tenggara yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, serta ekologi, serta kemampuan mengelola sumber daya tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Selain itu, Kabupaten Aceh Tenggara rentan terhadap bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial, sehingga penentuan prioritas pendanaan berpedoman pada rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka Kabupaten Aceh Tenggara mengupayakan untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangan seperti pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi dan dengan dikelola semaksimal mungkin sehingga dapat memberi manfaat ekonomi kepada daerah. Komponen terpenting dari kontribusi PAD adalah hasil pajak daerah, selain kedua sumber tersebut. Yang dapat meningkatkan pendapatan utama daerah yang

perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memberikan keleluasaan dalam hal pendapatan daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

Pajak adalah salah satu sarana pemerintah untuk meningkatkan penghasilan untuk meningkatkan keuangan negara yang bertujuan untuk membiayai biaya pembangunan ekonomi masyarakat dan nasional. Pajak ialah iuran yang didapat dari rakyat yang tidak diberikan ganti rugi secara langsung. Besaran pajak yang dibayarkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak dapat diminta kembali. Hal ini disebabkan oleh penggunaannya yang bersifat umum. Pajak didapat dari banyak sumber. Salah satunya, UU RI Pasal 1 angka 10 No.28/2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. “Pajak daerah adalah kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa didasarkan UU, dengan tidak memaksa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor sebagaimana dalam UU RI No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 menjelaskan pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor.

Salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan terkait pajak kendaraan bermotor adalah *one stop management system* di wilayah Aceh Tenggara atau disingkat SAMSAT. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT di kawasan Kutacane (Kab. Aceh Tenggara) adalah penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan layanan lain yang terkait dengan pembayaran ke kas negara. Biaya Transfer Mobil (BBNKB), kewajiban kontribusi wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ). Kehadiran SAMSAT di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah memenuhi kewajibannya dan memotivasi masyarakat untuk membayar pajak. Sistem manajemen yang mapan untuk mempromosikan layanan pembayaran pajak bagi masyarakat yang beroperasi di gedung/lokasi. Sistem Manajemen Terpadu Satu Pintu (SAMSAT) di wilayah Aceh Tenggara merupakan sistem kerja sama terpadu antara Polri, Sistem Pengelolaan Keuangan, dan sektor keuangan.

Salah satu pajak daerah yang termasuk dalam golongan tingkat 1 yaitu pajak kendaraan bermotor, di mana pajak dipungut berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor yang dipungut selama 12 bulan berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dan dibayar di muka (Rakatitha & Gayatri, 2017). Pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor karena pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di mana kendaraan bermotor salah satu kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, dengan demikian minat masyarakat sangat tinggi untuk dapat memiliki kendaraan bermotor (Zulkifli dalam, Rakatitha & Gayatri, 2017). Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan daerah yang berdampak bagi kemakmuran suatu daerah, hal ini dapat dilihat berdasarkan data SPT. Untuk dapat dikelola dengan baik, maka diperlukan sistem yang baik agar tidak terjadinya berbagai jenis tindakan penyimpangan maupun kecurangan dalam pemungutan agar pemungutan dan pengelolaan sumber dana PKB dapat dilakukan secara efektif juga efisien. Berikut ini adalah target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Selisih Tahun Sebelumnya (Rp)	Perkembangan (%)
2017	4.060.000.000,00	4.954.230.223,00	894.230.223,00	-	122,03%
2018	4.090.000.000,00	5.141.105.459,00	1.051.105.459,00	186.875.236,00	125,70%
2019	5.010.000.000,00	5.802.458.550,00	792.458.550,00	661.353.091,00	115,82%
2020	5.040.000.000,00	6.380.064.200,00	1.340.064.200,00	577.605.650,00	126,59%
2021	5.720.000.000,00	6.567.855.367,00	847.855.367,00	187.791.167,00	114,82%

Sumber : Laporan tahunan SAMSAT Kab. Aceh Tenggara

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa kantor unit pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017 pajak kendaraan bermotor yang terealisasi sebesar Rp. 4.954.230.223,00. Tahun 2018 realisasi pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar Rp.5.141.105.459, selisih realisasi dari tahun sebelumnya adalah Rp.186.875.236,00. Tahun 2019 pemerintah setempat menargetkan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.5.010.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.802.458.550,00. Pemerintah setempat menaikkan kembali target pajak kendaraan bermotor di tahun 2020 sebesar Rp.5.040.000.000,00 dan realisasi pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp.6.380.064.200,00 di mana pada tahun 2019 bertambah sebesar Rp.1.340.064.20,00 dari yang ditargetkan. Pada tahun 2021 pemerintahan setempat secara konsisten menaikkan target pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.5.720.000.000,00 dan realisasi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara menyentuh angka Rp.6.567.855.367,00. Realisasi pajak kendaraan

bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa tidak sedikit juga kendaraan yang terdaftar tidak membayar pajak kendaraan bermotornya. Untuk memperjelas kembali bahwa tidak sedikit kendaraan yang terdaftar dikenakan sanksi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB), dapat diperkuat oleh tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2 Denda Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021

TAHUN	UNIT	JUMLAH DENDA (Rp)
2017	3.518	464.372.857,00
2018	2.755	225.531.262,00
2019	2.814	255.667.450,00
2020	2.013	132.177.340,00
2021	2.560	233.713.050,00

Sumber : Laporan tahunan SAMSAT Kab. Aceh Tenggara

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa kantor unit pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017 denda pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.464.372.857,00 dengan jumlah 3.158 unit. Pada tahun 2018 denda pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan jumlah 2.755 unit dan jumlah denda pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.225.531.262,00. Tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor yang terkena denda mengalami peningkatan yakni 2.814 unit dengan jumlah denda sebesar Rp.255.677.450,00. Pada tahun 2020 jumlah denda pajak kendaraan mengalami penurunan sebesar Rp.132.177.340,00 untuk 2.013 unit. Namun, di tahun 2021 kendaraan bermotor yang terkena denda PKB mengalami

kenaikan sebanyak 2.560 unit dengan jumlah denda sebesar Rp.233.713.050,00. Pajak yang diterima dapat mencapai target guna membantu Pendapatan Asli Daerah, hal ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Apabila realisasi melebihi dari target yang ditentukan maka akan berdampak positif terhadap daerah, dan begitu pun sebaliknya jika realisasi tidak memenuhi target yang ditentukan maka akan berdampak negatif terhadap daerah. Maka perlu dilakukannya pengkajian mengenai penyebab tidak tercapainya target yang diharapkan (Wijaya et al., 2016).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik dengan fenomena tersebut. Alasan lain penulis memilih fenomena ini karena keinginan penulis untuk melihat apakah setiap tahunnya ada perkembangan kontribusi dan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara mengambil judul **“Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah berikut ini:

1. Seberapa besarkah Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017-2021?
2. Bagaimana tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017-2021?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji :

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017-2021
2. Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017-2021
3. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017-2021

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat manfaat penelitian, yaitu:

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian mampu menjadi rujukan baru untuk penelitian selanjutnya agar dapat memberikan wawasan tentang kontribusi PKB terhadap PAD Aceh Tenggara.

2. Bagi Instansi/Pemerintah Daerah

Manfaat bagi instansi pemerintah terkait yaitu dapat memberikan kajian data dari penelitian dalam mengambil kebijakan daerah dan diharapkan mampu menjadi jalan keluar yang berhubungan mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Laporan

Penelitian ini diharapkan mampu memperlihatkan data terbaru mengenai penerapan aturan yang ada dengan kondisi nyata dalam masyarakat. Manfaat bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi data atau wawasan terbaru untuk penelitian yang berhubungan dengan kontribusi pajak kendaraan bermotor selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Kajian ini disusun secara sistematis dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat unsur-unsur yang yang dimuat oleh peneliti seperti latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan uraian yang terdapat dalam bab ini seperti deskripsi yang bersifat umum digunakan sebagai pemahaman yang menunjukkan fakta yang didapatkan dari berbagai sumber, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual yang dapat memudahkan penggambaran secara umum atas subjek penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai proses penelitian yang meliputi metode penelitian, jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang dilakukan baik dengan pendokumentasian dan cara perhitungan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu Kabupaten Aceh Tenggara baik dari segi geografis. Selanjutnya diikuti dengan hasil penelitian dan hasil pembahasan dengan menggunakan metode dan teknik yang telah dipaparkan pada bab tiga yaitu metode penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan hasil rangkuman tentang penelitian baik dari segi analisis data yang dipaparkan pada bab hasil dan pembahasan, keterbatasan penelitian, implikasi dan juga saran dari peneliti untuk Kabupaten Aceh Tenggara maupun para peneliti selanjutnya



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Murphy (2010) mendefinisikan pajak sebagai pembayaran paksa yang diamanatkan oleh pembuat undang-undang dalam menjalankan kewenangan perpajakannya dan dikumpulkan serta diklaim untuk meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk kepentingan publik dan pemerintahan. Pajak adalah kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada badan keuangan negara (Najicha, 2022).

Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan menegakkan aturan-aturan tersebut untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak juga merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional, seperti membayar karyawan atau memelihara angkutan umum. Pajak adalah jasa yang harus dipungut dan dibayar oleh pihak berwenang secara sepihak (sesuai standar yang berlaku umum) yang berguna secara stabil untuk menutupi pengeluaran umum (Kusuma & Safitri, 2017).

Pajak menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan tiap warga negara untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada kas negara. Hal ini menjadi tanggapan untuk suatu peristiwa, perilaku atau keadaan posisi tertentu. Namun hal ini tidak dapat dilihat sebagai hukuman dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tidak ada layanan timbal balik langsung dari negara melainkan

aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat ditegakkan dengan maksud untuk menjaga kesejahteraan masyarakat (Octovido, 2014).

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan kewajiban menyerahkan separuh dari kekayaan untuk kas negara karena suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang memberikan suatu kedudukan. Berdasarkan landasan hukumnya, pajak yang ditetapkan pemerintah dan dapat dipaksakan dengan tujuan untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi pajak, terdapat 2 fungsi menurut Mardiasmo (2011) yakni:

- 1.) Fungsi pemerintahan (*Budgetair*). Fungsi pemerintahan dalam hal ini sebagai sumber pemasukan untuk pemerintah. Sebagai contoh pajak digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah dalam APBN.
- 2.) Fungsi mengatur (*Reguler*) yang artinya pajak memiliki kontrol dalam mengatur kebijakan ekonomi sosial. Sebagai contoh pemberian PPnBM sebagai pajak minuman beralkohol.

2.2 Pajak Daerah

Badan atau orang perseorangan wajib melakukan pembayaran kepada pemerintah daerah tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Tergantung pada peraturan yang berlaku, pajak ini dapat dikenakan dan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan daerah lebih lanjut (Ilmiah & Akuntansi, 2021). Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah terdapat 2 yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Salah satu cara berpikir tentang pajak daerah adalah sebagai cara bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam otonomi daerah. Pendapatan daerah digunakan untuk mendanai pajak daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah. Pajak daerah bersifat memaksa yang dibayar oleh satu orang atau suatu lembaga. Bentuk dari wujud pajak bagi masyarakat yaitu pembangunan atau perbaikan jalan, pembangunan jembatan sebagai penyambung jalan antar desa, untuk membuka lowongan pekerjaan baru, pelatihan kerja sumber daya manusia tiap daerah dan untuk urusan pembangunan pemerintah lainnya. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat yang bersifat wajib kepada pemerintah daerah yang diberikan oleh satu orang atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa adanya timbal balik secara langsung. Mereka dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, “Dalam suatu daerah ataupun kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota, “Bersifat pajak dan bukan retribusi, objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup

rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak pusat, potensinya memadai, tidak memberikan dampak negatif bagi perekonomian, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan”.

Berdasarkan UU No 28 tahun 2009, terdapat 2 jenis pajak, yaitu pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi. Dalam UU No. 28 tahun 2009, pajak provinsi berisi, “Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan”. Sedangkan Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari “Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan galian golongan C dan pajak parkir kendaraan”.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, “Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor beserta trailernya yang digunakan di semua jenis jalan negara”. (Satispi & Aziz Samudra, 2021) mengutarakan bahwa pajak kendaraan bermotor ialah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan, tidak termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang tidak digunakan sebagai alat angkut seperti bulldozer, excavator, loader, dan lain-lain.

1.) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Pasal 4 ayat 1 UU No.28 Tahun 2009 menjelaskan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan subjek pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- b. Pasal 4 berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No.11 Tahun 2018 menjelaskan setiap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Aceh dipungut PKB

2.) Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3 ayat 1 UU RI No.28 Tahun 2009 menjelaskan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa objek pajak kendaraan bermotor ialah kepemilikan / penguasaan kendaraan bermotor.

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum dalam memungut PKB yaitu berdasarkan ketentuan UU No. 28 tahun 2009 pasal 3 – 8 PDRD, Pengenaan PKB tidak diterapkan di seluruh provinsi. Oleh karena pajak dapat diperoleh dari provinsi, dengan adanya peraturan daerah mengenai teknis pajak juga pemungutan pajak dari kendaraan bermotor di daerah atau provinsi tertentu yang berlaku.

UUD 1945 pasal 23A dijelaskan sebagai landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Peraturan mengenai pajak

mengalami perubahan yang cukup drastis setelah adanya amandemen UUD 1945, hal ini dapat ditinjau pada pasal 23A.

Pasal 6 ayat 1 UU No.28 Tahun 2009 dijelaskan mengenai besaran tarif PKB. Pertama, pada kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling minimal sebanyak 1% dan maksimal sebanyak 2%. Kedua, pada kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan berikutnya ditetapkan tarif secara progresif minimal 2% dan maksimal 10%. Pajak progresif kepemilikan kedua hingga berikutnya dapat dibedakan seperti kendaraan beroda yang minim dari 4, kendaraan beroda 4 atau lebih di mana kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan atas nama ataupun alamat yang sama.

Dalam hitungan Pajak Kendaraan Bermotor, besar biaya yang harus dibayarkan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar dibayarkan pajak. Dalam penerapannya, PKB telah dirumuskan sebagai berikut :

$$Pajak\ Terutang = \frac{Tarif\ Pajak \times Dasar\ Pengenaan\ Pajak}{Tarif\ Pajak \times (NJKB \times Bobot)}$$

2.3.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang yang wajib dilunasi sekalian di muka dalam jangka waktu dua belas bulan. PKB dibayarkan dalam jangka 30 hari sejak diterbitkannya data-data sebagai berikut:

- a. Surat Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
- d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

- e. Perintah Pembedulan
- f. Keputusan Penolakan dan Keputusan Banding

Di mana mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak terutang. Pembayaran PKB ke brankas lokal bank, ataupun tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur, dengan membawa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang telah menyelesaikan pembayaran. Sanksi Keterlambatan pembayaran pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari jumlah pokok pajak kepada wajib pajak yang terlambat. Keterlambatan pembayaran pajak berdasarkan SKPD lebih dari 15 hari setelah tanggal jatuh tempo dapat dikenakan sanksi administrasi sebanyak 2% per bulan, dihitung untuk pajak yang kurang / terlambat dibayar paling lama 24 bulan sejak tanggal terutangnya pajak.

Penagihan PKB apabila pajak yang terutang belum dibayar setelah batas waktu pembayaran pajak, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan. Pajak yang terutang di SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, keputusan pembedulan, keputusan oposisi dan keputusan banding, mengakibatkan peningkatan jumlah pajak yang terutang.

2.4 Kontribusi

Kontribusi adalah peran nyata dalam keikutsertaan dalam melakukan sesuatu (KBBI, 2014). Kontribusi dalam fenomena ini adalah kontribusi pajak daerah. Kontribusi pajak merupakan persentase pemasukan yang didapat dari pajak

suatu daerah banding total pendapatan daerah dan hasilnya hanya setengah dari Anggaran Daerah.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Adisasmita, 2011) komponen sumber pendanaan daerah adalah pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendanaan ini kemudian digunakan untuk menjadi sumber penyelenggaraan pemerintah daerah (Gede & Artini, 2017). Sedangkan menurut (Kosanke, 2019) pendapatan asli tidak hanya dari retribusi daerah juga didapatkan dari hasil pengelolaan sumber daya alam daerah, hasil badan usaha milik daerah dan pendapatan daerah lain yang sah.

2.5.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan sumbernya, pendapatan asli bersumber dari 3 hal. Yang pertama dari pendapatan asli daerah dapat berwujud seperti hasil pajak daerah, hasil badan usaha milik daerah, hasil retribusi daerah dan hasil usaha daerah itu sendiri. Yang kedua dari pemasukan bersumber dari pemberian pemerintah pusat, seperti sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan lainnya dalam perundang-undangan. Dan yang terakhir pendapatan-pendapatan lain yang sah.

Pendapatan lain-lain ini berasal dari UU Pajak daerah diatur dan telah dipertimbangkan baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Aturan mengenai pajak dan retribusi daerah telah diatur dalam perundang-undangan. Aturan mengenai pajak dan wajib pajak telah diatur dalam UU dan pajak daerah

diatur oleh Peraturan Daerah. Perusahaan milik pemerintah daerah diatur dan diawasi berdasarkan asas ekonomi perusahaan pemerintah sedangkan aturan pokok mengenai perusahaan daerah telah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Beberapa usaha yang telah didirikan oleh pemerintah yang menjadi sumber pemasukan daerah yang telah diatur. Peraturan daerah juga mengatur mengenai beberapa usaha yang didirikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjadi sumber pemasukan daerah dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan peraturan yang telah disetujui oleh DPRD, kepala daerah mampu memutuskan untuk membuat perjanjian utang-piutang atau membuat pinjaman bagi kepentingan daerah itu sendiri. Dalam perjanjian tersebut juga tertulis mengenai sumber pembayaran bunga, jumlah angsuran pinjaman per lama pinjaman dan bagaimana pembayarannya. Keputusan ini juga membutuhkan pengesahan Menteri Dalam Negeri mengingat ini adalah urusan negara.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini. Untuk lebih jelasnya akan ditunjukkan pada hasil penelitian terdahulu di bawah ini:

Tabel 2. 1 Talaah Kajian Terdahulu

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Abdul Muis & Adhitama, S.Sos.,M.si, 2021)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerimaan PKB di DKI Jakarta tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dengan tingkat efektivitas sebesar 1000,88%. Tidak seperti PKB, penerimaan BBN kendaraan bermotor mengalami fluktuasi dengan nilai rata-rata sebesar 97,87%, sama halnya dengan penerimaan bahan bakar kendaraan bermotor juga mengalami fluktuasi dengan nilai rata-rata sebesar 99,42% dari tahun 2014-2018. Ketiganya memiliki kontribusi terhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2014-2018 yaitu PKB dengan nilai rata-rata sebesar 18,27% termasuk dalam kategori kurang berkontribusi, BBNKB dengan nilai rata-rata sebesar 13,44% termasuk dalam kategori kurang berkontribusi dan BBM dengan nilai rata-rata sebesar 3,17% termasuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi.
2	(Meiriasari & Ratu, 2021)	Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Laju Pertumbuhan PBBKB terhadap PAD Sumatera Selatan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingginya efektivitas dalam penerimaan PBBKB di Sumatera Selatan tahun 2014-2018 dengan nilai rasio di atas 80% dan juga Kontribusi penerimaan PBBKB cukup berkontribusi dalam PAD di Sumatera Selatan walaupun sangat fluktuatif dengan persentase terendah sebesar 20,15% dan tertinggi sebesar 24,42%.

3	(Assa et al., 2018)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode (2013-2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PKB terhadap PAD di Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013-2017 sangat kecil atau tidak mencapai target dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 dan 2015 kontribusi PKB terhadap PAD tidak jauh berbeda sebesar 31,36%, dan 31,18%, selanjutnya pada tahun 2016-2017 kontribusi PKB mengalami kenaikan dengan nilai sebesar 32,94% dan 33,26% di mana pada 2 tahun ini merupakan kontribusi terbesar dalam 5 periode dan kontribusi PKB terendah berada pada tahun 2014 sebesar 29,88%.
4	(Mughtar & Dkk, 2017)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan rata-rata kontribusi pajak kendaraan di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2012-2015 sebanyak 7,96%. Pada tahun 2014 merupakan puncak tertinggi kontribusi pajak PKB terhadap PAD di Kab, Barito sebesar 10,22%. Walaupun setiap tahunnya kontribusi terhadap PAD mengalami fluktuasi namun masih dalam kategori yang relatif stabil.
5	(Putra Prasetya, 2018)	Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Pada hasil penelitian tersebut menunjukkan rata-rata realisasi juga target pajak kendaraan bermotor dari tahun 2013-2018 termasuk dalam golongan sangat efektif. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas PKB sebesar 101,16%, disusul tahun 2014-2015 termasuk dalam kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 100,62% dan 100,37%. Selanjutnya pada tahun

			<p>2016 tingkat efektivitas PKB sebesar 102,08% disusul dengan tahun 2017 yang mengalami penurunan sebesar 99,73% walaupun mengalami penurunan namun efektivitas PKB masih termasuk dalam kategori yang efektif. Di samping tingkat efektivitas yang sangat bagus, kontribusi PKB terhadap provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun dari tahun 2013-2017 berada pada kategori yang sedang dengan jumlah rata-rata sebesar 28,51%.</p>
6	(Rizal & Hidayah, 2018)	<p>Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh</p>	<p>Hasil penelitian tertulis bahwa PKB dan BBNKB SAMSAT Aceh Timur memiliki kontribusi sebesar 0,028% kepada Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh dengan laju pertumbuhan yang terus meningkat yaitu rata-rata dari laju pertumbuhan sebesar 7,41%.</p>
7	(Awaluddin et al., 2021)	<p>Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah kontribusi PKB terhadap PAD di provinsi Sulawesi Tenggara masih kurang dengan nilai persentase sebesar 14,95% dengan ini termasuk dalam kategori kurang berkontribusi, sedangkan kontribusi BBNKB terhadap PAD termasuk dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 26,16% yang artinya BBNKB memberikan</p>

		Sulawesi Tenggara	kontribusi yang cukup baik terhadap PAD di Sulawesi Tenggara.
8	(Wahida & Sorong, 2018)	Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Kota Palopo	Dari hasil penelitian yang dilakukan rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD Kota Palopo masuk dalam kategori sangat baik, di mana nilai dari kontribusi sebanyak 55,20%.
9	Putu Nadya Kardevi Rakatih & Gayatri (2017)	Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah	Hasil dari penelitian ini sebagai berikut, PKB berdampak pada PAD di Bali pada periode 2013-2016. Rata-rata PKB tiap tahunnya berkontribusi pada pendapatan asli daerah sebesar 31,94 %.
10	(Nurmala & Sari, 2018)	Analisis Pendapatan Asli Daerah dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Hasil dari penelitian ini sebagai berikut, dari tingkat efektivitas dari realisasi penerimaan PKB di Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kategori sudah efektif dengan nilai sebesar 100%. Kontribusi PKB terhadap PAD dari periode 2011-2015 termasuk dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata kontribusinya sebesar 20,10%-30%
11	(Suci Naeshati Suningsih, Risma Wira Bharata, 2021)	Effectiveness and Contribution Analysis Of Local Taxes And Retributions To Regional Own-Source Revenue	Dari hasil penelitian kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah menunjukkan rata-rata 9,42% atau masih di bawah 30%, namun pencapaian PAD di Kabupaten Situbondo terus meningkat dari tahun 2010 hingga 2019. Kontribusi setiap sumber PAD terhadap Total PAD dalam proporsi rata-rata menunjukkan Pajak Daerah 20,16%, Retribusi Daerah 11,38%, Hasil Badan Usaha

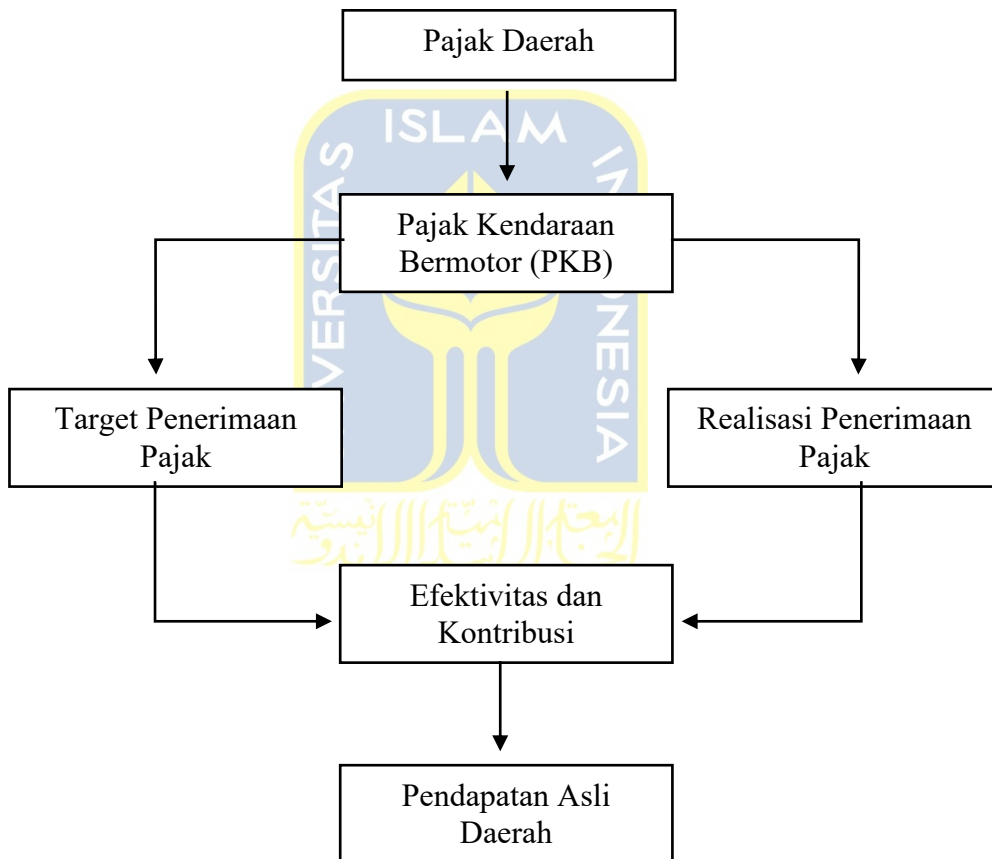
			Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Terpisah 3,83% Lain-lain PAD Sah adalah 64,3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan berasal dari PAD Lain yang Sah. Efektivitas penerimaan dari sumber-sumber PAD menunjukkan angka 100,28% atau “sangat efektif”, namun selama beberapa periode realisasi penerimaan dari PAD menunjukkan efektivitas yang fluktuatif.
12	(Wahyuni & Fandiyanto, 2021)	Analysis of the Effectiveness and Contribution of Regional Income on the Revenue and Expenditure Budget Situbondo City	Efektivitas penerimaan dari sumber-sumber PAD menunjukkan angka 100,28% atau “sangat efektif”, namun selama beberapa periode realisasi penerimaan dari PAD menunjukkan efektivitas yang fluktuatif. Tahun 2010 (100,97%), tahun 2011 (101,33%), tahun 2012 (102,29%), tahun 2013 (100,94%), tahun 2014 (101,15%) dan tahun 2018 (101,43%) menunjukkan kriteria “sangat efektif”, namun untuk tahun 2015 (99,05%), realisasi pendapatan tahun 2016 (97,18%), tahun 2017 (98,23%) dan tahun 2019 (99,51%) berada di bawah target yang ditetapkan atau masuk dalam kategori “efektif”.

2.7 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual memberikan kemudahan dalam kegiatan penelitian, memperjelas akar pemikiran pada penelitian, dan menggambarkan dasar suatu pemikiran secara umum. Kerangka konseptual juga mengacu pada gambar dengan variabel yang ditetapkan dalam penelitian dan juga variabel yang memengaruhinya. Menggunakan analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor variabel yang

memengaruhi dan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai variabel yang dipengaruhi. Kerangka pikir bertujuan untuk memperkirakan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dan diilustrasikan pada gambar berikut.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bentuk kuantitatif menggunakan data sekunder. Data kuantitatif merupakan bentuk angka-angka yang disajikan di dalam data. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini di mana hasil analisis yang ditemukan akan menjabarkan seberapa besar Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Penelitian ini bertempat di SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang beralamat Pulo Sanggar, Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 24651.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang dari 2 bulan dimulai dari awal bulan Oktober hingga akhir bulan November 2022.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran

Definisi operasional merupakan definisi teoritis dan konseptual dan memberikan landasan untuk menentukan indikator dalam mengembangkan

perangkat suatu penelitian. Studi ini mempunyai definisi operasional sebagai berikut:

3.3.1 Variabel Dependen (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan asli daerah yang berupa pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan keleluasaan mencari dana dari daerah. Penghasilan yang diperoleh dari penghasilan asli penduduk setempat lain yang sah di Kabupaten Aceh Tenggara dalam kurun waktu 2017-2021 yang diukur dengan satuan rupiah (Rp).

3.3.2 Variabel Independen (Pajak Kendaraan Bermotor)

Pajak kendaraan bermotor menurut UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut dari PKB yang menghasilkan perolehan atau kepemilikan PKB oleh orang pribadi atau kelompok di Kabupaten Aceh Tenggara dalam kurun waktu 2017-2021 yang diukur dengan satuan rupiah (Rp).

3.4 Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu suatu hal yang dapat membentuk topik dalam penelitian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tenggara bersumber dari laporan keuangan tahun 2017-2021 menjadi objek dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data agar dapat memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai pusat data yang ada, termasuk sumber data perusahaan, penelitian dan organisasi lain menggunakan data survei. Data yang ditemukan dalam penelitian ini menggunakan 2 metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang diterapkan untuk memperoleh data juga informasi dalam berbagai bentuk dengan melibatkan pengumpulan data mengenai subjek yang sedang diteliti. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) wilayah Aceh Tenggara.

3.5.2 Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengumpulan data ditujukan untuk pencarian data maupun informasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan rujukan dari penelitian terdahulu. Referensi diperoleh dari tesis, buku, jurnal, dan internet serta berbagai sumber lain yang relevan dari pustaka dan instansi yang terikat dengan masalah penelitian

3.5.3 Wawancara

Wawancara merupakan percakapan percakapan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih antara seorang narasumber dan pewawancara, dengan berbagai tujuan untuk dapat mengumpulkan data berupa informasi. Teknik wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian tertentu.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data terkait pajak kendaraan bermotor dan PAD dengan melakukan perhitungan.

3.6.1 Analisis Efektivitas

Menurut (Mardiasmo,2011) ukuran berhasil atau gagal nya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya merupakan ukuran efektivitas. Suatu organisasi dapat dikatakan berjalan dengan efektif, apabila organisasi tersebut berhasil dalam mencapai tujuannya. Maka dari itu, untuk mengukur efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dapat menggunakan rumus yang telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh peneliti terdahulu (Adelina Rima, 2011) dengan menggunakan rumus di bawah ini

$$Efektivitas\ PKB = \frac{Realisasi\ PKB}{Target\ PKB} \times 100\%$$

Keterangan :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk Mengukur tingkat efektivitas maka menggunakan indikator pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3. 1 Kriteria Efektifitas

Persentase	Kriteria
>,100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<,60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Adelina, 2013)

3.6.2 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan suatu alat dalam analisis yang dapat dipakai agar dapat mengetahui kontribusi PKB yang dapat berpengaruh terhadap PAD. Cara untuk menghitung berapa banyak kontribusi PKB terhadap PAD selama 5 tahun terakhir (2017-2021), Dengan menerapkan rumus di bawah ini

$$X = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Tahun

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

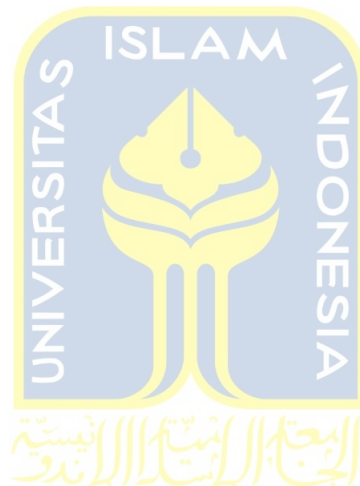
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Untuk Mengukur kontribusi maka menggunakan indikator pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3. 2 Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0-10	Sangat Kurang
11-20	Kurang
21-30	Sedang
31-40	Cukup Sedang
41-50	Baik
Di atas 50	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri UGM, 1991 (Handoko, 2013)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Geografis

Aceh Tenggara lebih multicultural dari Aceh Tengah (Aceh Tengah, Beber Meriah dan Gayo Lues) dan dihuni oleh lebih dari 3 suku, yaitu : Suku Alas sebagai suku lokal, diikuti suku pendatang seperti Singkil, Aceh, Karo, Batak Toba, Gayo, Jawa, Minangkabau, Mandailing, Nias dan suku Aneuk Jamee.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3055'23"-4016'37"LU dan 96043'23'-98010'32"BT. Berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kutacane merupakan pintu masuk kawasan aceh ke dalam Taman Nasional Pegunungan Leuser (TNGL), sekitar 5-6 jam perjalanan darat dari Medan di Sumatera Utara melalui daerah Karo.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Sebaran kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara

Jumlah kendaraan selama periode 2017-2021 di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami peningkatan setiap tahun nya, dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara

Tahun	Motor	Mobil	Jumlah	Pertumbuhan
2017	1.630	8.474	10.104	12,15%
2018	1.559	7.323	8.882	11,17%
2019	1.728	7.473	9.201	14,12%
2020	1.822	6.859	8.681	10,18%
2021	1.808	6.894	8.702	13,14%

Sumber : Laporan tahunan SAMSAT Kab. Aceh Tenggara

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah dan perkembangan kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Aceh Tenggara dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat sebanyak 10.104 unit dengan nilai pertumbuhan 12,15%. Di tahun 2018 pertumbuhan kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 11,17%, di mana selisih dengan tahun sebelumnya 0,98% dan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 8.882 unit. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9.201 unit di mana nilai pertumbuhan juga mengalami peningkatan menjadi 14,12%. Pertumbuhan mengalami penurunan sebanyak 3,94%, di mana tahun 2020 menjadi 10,18% dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebesar 8.681 unit. Pada tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami kenaikan pertumbuhan yakni 13,14% dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 8.702 unit.

4.2.2 Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Efektivitas pajak kendaraan bermotor merupakan gambaran di mana kemampuan pemerintah dalam hal merealisasikan PKM dengan membandingkannya terhadap anggaran berdasarkan potensi riil daerah tersebut.

Dengan demikian, untuk membandingkannya dapat menggunakan rumus di bawah ini :

$$Efektivitas\ PKB = \frac{Realisasi\ PKB}{Target\ PKB} \times 100\%$$

Jika efektivitas PKB dihitung mendekati atau melebihi persentase 100%, maka pemungutan PKB atau pajak kendaraan di Kabupaten Aceh Tenggara semakin membaik. Kriteria perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Adelina Rima, 2011)

Pada Kabupaten Aceh Tenggara perhitungan efektivitas pajak kendaraan bermotor periode 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Target Penerimaan, Realisasi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2017	4.060.000.000,00	4.954.230.223,00	122,03%	Sangat Efektif
2018	4.090.000.000,00	5.141.105.459,00	125,70%	Sangat Efektif
2019	5.010.000.000,00	5.802.458.550,00	115,82%	Sangat Efektif
2020	5.040.000.000,00	6.380.064.200,00	126,59%	Sangat Efektif
2021	5.720.000.000,00	6.567.855.367,00	114,82%	Sangat Efektif

Sumber : Laporan tahunan SAMSAT Kab. Aceh Tenggara

Berdasarkan perhitungan efektivitas pada tabel 4.3 di atas, memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor pada periode 2017-2021

memperlihatkan peningkatan. Efektivitas pajak kendaraan sebesar 126,59% menjadi yang tertinggi dengan kategori sangat efektif di tahun 2020. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa aturan pembayaran pajak yang telah direalisasikan secara menyeluruh kepada oknum pajak telah tersampaikan. Selanjutnya, pada tahun 2019 dan 2021 tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor sebesar 115,82% dan 114,82% termasuk dalam kategori sangat efektif. Walaupun target yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun para wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga realisasi pajak kendaraan bermotor bisa melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dapat dilihat dari hasil analisis di atas memperlihatkan dari tahun ke tahun realisasi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh tenggara berfluktuasi dan rata-rata melebihi dari target yang diharapkan yang di mana Kabupaten Aceh Tenggara tentunya terkait dengan kebijakan pemungutannya telah mencapai target. Hasil dari analisis memperlihatkan bahwa efektivitas PKB di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017-2021 termasuk dalam kategori sangat efektif di mana rata-rata efektivitas penerimaan pajaknya mencapai 119,08%.

4.2.3 Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021

Kontribusi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian. Kontribusi dapat berupa materi maupun suatu tindakan. Jadi kontribusi merupakan pemberian adil setiap kegiatan, peran, masukan, ide, dan lain sebagainya. Disebutkan dalam kamus ekonomi bahwa segala sesuatu yang

diberikan kepada pihak lain dalam rangka tujuan bersama merupakan istilah dari kontribusi. Agar dapat menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara pada periode 2017-2021 dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi pajak terhadap PAD masuk dalam kategori sangat baik apabila perhitungan kontribusi yang dihasilkan minimal dari 50%, dengan kata lain kontribusi pajak terhadap PAD tersebut tergolong banyak. Kriteria dari tingkat kontribusi pajak kendaraan terhadap PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 4 Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0-10	Sangat Kurang
11-20	Kurang
21-30	Sedang
31-40	Cukup Sedang
41-50	Baik
Di atas 50	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri UGM, 1991 (Dalam Handoko, 2013)

Di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017-2021 kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut :

**Tabel 4. 5 Realisasi PKB dan Tingkat Kontribusi PKB Terhadap PAD di
Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2017	4.954.230.223,00	60.053.234.222,18	8,25%	Sangat Kurang
2018	5.141.105.459,00	80.263.476.272,42	6,41%	Sangat Kurang
2019	5.802.458.550,00	117.628.924.350,95	4,93%	Sangat Kurang
2020	6.380.064.200,00	98.346.791.313,67	6,49%	Sangat Kurang
2021	6.567.855.367,00	81.385.176.053,49	8,07%	Sangat Kurang

Sumber : Laporan tahunan SAMSAT Kab. Aceh Tenggara

Pada gambar di atas memperlihatkan bahwa rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD dari tahun 2017-2021 yaitu sebesar 6,83%. Data di atas menunjukkan bahwa dalam meningkatkan PAD kontribusi PKB di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017 termasuk dalam kategori sangat kurang dengan memberikan kontribusi sebesar 8,25%. Penerimaan PKB pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan dengan kontribusi sebesar 6,41% dan 4,93% di mana ini termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2020 kontribusi PKB mengalami peningkatan sebesar 6,49% dibanding tahun sebelumnya dan meningkat kembali di tahun 2021 sebesar 8,07% namun dengan kriteria sangat kurang.

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Aceh Tenggara

sangat fluktuatif dan tergolong sangat efektif, di mana rentang persentase efektivitas pemungutan PKB di tahun 2017-2021 sebesar 120,99% selama periode tersebut.

Dari hasil yang didapatkan memperlihatkan efektivitas PKB pada tahun 2017 sebesar Rp.4.954.230.223,00 atau 122,03% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp.4.060.000.000,00 maka pada tahun 2017 PKB Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori sangat efektif.

Persentase efektivitas pajak kendaraan bermotor tahun 2018 sebesar 125,70% atau Rp. 5.141.105.459,00 dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp. 4.090.000.000,00 dengan itu pada tahun 2018 PKB Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori sangat efektif.

Pada tahun 2019 persentase efektivitas pajak kendaraan bermotor sebesar 115,82% atau Rp.5.802.458.550,00 dari target PKB yang ingin dicapai sebesar Rp. 5.010.000.000,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun mengalami penurunan sebesar 9,88% namun pada tahun 2019 efektivitas pajak kendaraan bermotor Kabupaten Aceh Tenggara masuk dalam kategori sangat efektif.

Persentase efektivitas pajak kendaraan bermotor Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021 adalah 126,59% atau sebesar Rp. 6.380.064.200,00 di mana pada tahun ini mengalami kenaikan 10,77% di mana target yang ingin dicapai sebesar Rp.5.040.000,00. Maka efektivitas pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021 termasuk dalam kategori sangat efektif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara telah mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dari Kabupaten Aceh Tenggara di mana efektivitas PKB masuk dalam kategori sangat efektif.

4.3.2 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor tergolong sangat rendah terhadap pendapatan asli daerah, dapat dilihat dari persentase pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara dalam lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021.

Dari hasil yang diperoleh, penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 mencapai 8,25% dari total realisasi sebesar Rp. 4.954.230.223,00 dan total PAD Kabupaten Aceh Tenggara sebesar Rp.60.053.234.222,18. Dengan demikian pada tahun 2017 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kriteria kontribusi sangat kurang.

Persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2018 adalah 6,41% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp.80.263.476.272,42 dan realisasi penerimaan PKB sebesar Rp.5.141.105.459,00 di mana pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 1,84%. Maka pada tahun 2018 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kriteria kontribusi sangat kurang.

Pada tahun 2019 persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 4,93% dengan realisasi PKB sebesar Rp.55.802.458.550,00,00 dan pendapatan asli daerah sebesar Rp.117.628.924.350,95 di mana pada tahun ini persentase kontribusi PKB terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 1,47%. Dengan demikian kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori sangat kurang.

Dari hasil yang diperoleh, penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 mencapai 6,49% dari total realisasi sebesar Rp.6.380.064.200,00 dan total PAD Kabupaten Aceh Tenggara sebesar Rp.98.346.791.313,67. Walaupun mengalami kenaikan sebesar 1,55% namun kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara masih tergolong dalam kategori sangat kurang.

Persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2021 adalah 8,07% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp.81.385.176.053,49 dan realisasi penerimaan PKB sebesar Rp.6.567.855.367,00 dan mengalami kenaikan dalam 2 tahun berturut turut. Walaupun mengalami kenaikan sebesar 1,58% namun kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara masih tergolong dalam kategori sangat kurang.

Hasil di atas menunjukkan bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rata-rata kontribusi sebesar 6,83% selama 5 tahun terakhir termasuk dalam kategori kontribusi sangat kurang, hal ini terlihat dari tingkat capaian PAD yang diterima cukup tinggi yaitu dengan rata-rata sebesar Rp.87.535.520.442,54. Selain dari tingginya realisasi PAD, realisasi PAD tidak hanya diperoleh dari PKB saja,

tetapi juga dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah lainnya. Dengan demikian, kontribusi PKB terhadap PAD Kabupaten Aceh Tenggara dalam 5 tahun terakhir termasuk kategori sangat kurang.

4.3.3 Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara

Hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh dari SAMSAT dan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan juga berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam proses penyempurnaan data, peneliti juga mewawancarai seorang pegawai dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam wawancara yang dilakukan, peneliti menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara, berikut wawancara yang dilakukan peneliti:

Tabel 4. 6 Hasil Wawancara Tahun 2022

Peneliti	Narasumber	Solusi
<p>Bagaimana cara agar penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara dapat selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah?</p>	<p>Setiap tahunnya realisasi pajak kendaraan bermotor pada BPK Kabupaten Aceh selalu mencapai target, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang sadar terhadap pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian untuk mencapai target SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara selalu menerapkan 3 hal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak kendaraan bermotor</p>	<p>Ada beberapa Langkah-langkah yang dilakukan SAMSAT Aceh Tenggara untuk meningkat kesadaran masyarakat tentang pajak kendaraan bermotor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SAMSAT Aceh Tenggara selalu mengimbau masyarakat aceh tenggara melalui media cetak dan elektronik agar taat dan tepat waktu dalam mengurus perpanjangan pajak kendaraan bermotor. 2. SAMSAT Aceh Tenggara melakukan sosialisasi di setiap Desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara melalui Kepala Desa dan perangkat Desa tentang peraturan dan cara pengurusan perpanjangan pajak kendaraan bermotor, baik itu pajak tahunan, pergantian stnk 5 tahunan, balik nama kendaraan bermotor dan Mutasi kendaraan bermotor. 3. SAMSAT Aceh Tenggara setiap 1 tahun sekali melakukan Razia pajak kendaraan Bermotor khusus kendaraan BL (kode Kendaraan yang digunakan untuk plat kendaraan daerah Aceh), yang dibantu Oleh pihak Kepolisian, Polisi Militer dan Dinas

		Perhubungan guna penertiban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara.
Bagaimana proses penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara?	Proses penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Aceh Tenggara, Pemohon wajib pajak menyetor biaya kendaraannya kepada bendahara SAMSAT, dan Bendahara Samsat mengkompulir seluruh berkas-berkas dalam satu hari lalu di setor ke Bank Aceh untuk selanjutnya disetor ke Pemerintah Provinsi Aceh.	Agar mempermudah proses pembayaran PKB, maka pembayaran pajak dapat dilakukan melalui online (Aplikasi <i>Action</i>)
Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara?	Faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara kurang sadar dan tidak terbuka terhadap pajak kendaraannya, seperti lupanya akan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga waktu pembayaran jatuh tempo,.	SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara akan terus mengimbau dan mengingatkan masyarakat terhadap pajak kendaraannya. Dengan di terobosan yang dilakukan oleh SAMSAT, target dari pemerintah dapat terpenuhi dan tercapai setiap tahunnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara tergolong sangat efektif di mana realisasi dapat melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan rata-rata efektivitas sebesar 120,99% dari tahun 2017-2021. Dengan ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PKB di atas standar Kepmendagri No.690.900.327 dengan persentase di atas 100% yang artinya efektivitas penerimaan sangat efektif.
- 2) Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tenggara tergolong sangat kurang di mana rata-rata kontribusi terhadap PAD hanya sebesar 6,83% dari tahun 2017-2021. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh tidak hanya dari PKB tetapi juga dari berbagai sektor pajak daerah dan juga retribusi daerah lainnya. Dengan ini menunjukkan bahwa tingkat kontribusi PKB terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tenggara di bawah standar Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 dengan persentase di bawah 10% yang artinya kontribusi PKB terhadap PAD sangat kurang.

- 3) Beberapa hambatan dalam proses penerimaan PKB di Kabupaten Aceh Tenggara akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak kendaraannya namun di samping kekurangan itu pihak yang bertugas dalam penerimaan PKB (SAMSAT) mengimbau dan mengingatkan masyarakat secara terus-menerus untuk patuh dalam pembayaran pajak kendaraannya guna tercapainya target dan realisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil dari penelitian yaitu:

- 1) Penelitian ini dilakukan hanya di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara
- 2) Penelitian ini hanya menggunakan 1 jenis pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor.
- 3) Objek pada penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 5 tahun.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

- 1) Diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tenggara saja tetapi dapat melakukan penelitian ke semua wilayah Aceh.

- 2) Diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti satu jenis pajak daerah tetapi juga dapat meneliti jenis-jenis pajak daerah lainnya atau dapat menggabungkan beberapa jenis pajak daerah lainnya.
- 3) Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan rentang waktu penelitian tidak hanya 5 tahun.

5.4 Implikasi Penelitian

- 1) Hendaknya SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara dapat meningkatkan kembali tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak guna membantu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah seoptimal mungkin. Tidak hanya itu diharapkan agar SAMSAT dapat bersikap tegas terhadap masyarakat yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor milik pribadi dan melakukan berbagai sosialisasi yang menyeluruh demi kesejahteraan bersama.
- 2) Untuk mengembangkan informasi hendaknya UPTD Kabupaten Aceh Tenggara dapat mengamankan data-data yang diperlukan di masa mendatang agar dapat menjadi bukti dan sebagai jasa informasi berupa informasi keuangan kuantitatif agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, M & Adhitama. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*.
- Adelina, R. (2013). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi AKUNESA, 1(2)*, 1–20.
- Adelina Rima. (2011). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (pbb) terhadap pendapatan daerah kabupaten gresik. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*.
- Adisasmita, T. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Yogyakarta: In *yogyakarta*.
- Assa, P. G., Manossoh, H., & Mawikere, L. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode (2013-2017). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*.
- Awaluddin, I., Tamburaka, S., & Ibrahim, M. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bae Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Gede, L., & Artini, S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia email: tarastya@gmail.com > Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da. *E-Jurnal Manajemen Unud, 6(5)*, 2360–2387.
- Handoko, S. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) UNTAN*.
- Ilmiah, J., & Akuntansi, C. (2021). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi* p-ISSN: 2338-3593. 84–95.
- KBBI. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online-definisi kata. In *Potensi*.
- Kosanke, R. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Kusuma, M., & Safitri, N. (2017). Penerapan Kebijakan Elektronik Faktur Pajak Dalam Rangka Kemudahan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Selatan. *Reformasi Administrasi*.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. *Andi*.
- Meiriasari, V., & Ratu, M. K. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PBBKB Terhadap PAD Sumatera Selatan. *Jurnal Proaksi*.
- Muchtar, M., & Dkk. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito. *Jurnal Ilmu Ekonomi, 1*, 385–399.
- Murphy, K. E., Higgins, M., & Lightner, T. (2010). Concepts in Federal Taxation,. *Issues in Accounting Education*.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara

- pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169.
- Nurmala, N., & Sari, R. P. (2018). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Bada Pendapatan DAERAH Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ecoment Global*.
- Octovido, I. (2014). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 1–7.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 pasal 4 tentang pemungutan PKB
- Putra Prasetya. (2018). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Photosynthetica*, 2(1), 1–13.
- Rakatitha, P. N. K., & Gayatri. (2017). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah. *Akuntansi*.
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>
- Satsipi, E., & Aziz Samudra, A. (2021). *Public Policy Implementation of the Jakarta Government's Policy: Study of Community Relocation Around the Reservoir. The Social Perspective Journal*.
- Suci Naeshati Suningsih, Risma Wira Bharata, A. P. (2021). *Effectiveness and Contribution Analysis Of Local Taxes And Requisitions To Regional Own-Source Revenue*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 27–39.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 tentang Dasar Hukum Paling Utama Berlakunya Pajak di Indonesia
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1 tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 mengenai Pajak Atas Kepemilikan Penguasaan Kendaraan Bermotor
- Wahida, & Sorong, A. (2018). Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Kota Palopo. In *JEMMA* (Vol. 1, Issue 1).
- Wahyuni, I., & Fandiyanto, R. (2021). *Analysis of the Effectiveness and Contribution of Regional Income on the Revenue and Expenditure Budget Situbondo City*. 2.
- Wijaya, B. K., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Accounting*, 2(2), 1–28.

LAMPIRAN

Laporan Pendapatan Asli Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN CEH TENGGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016
(Audited)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Reff	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
1	PENDAPATAN	4.5.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.5.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	4.3.1.1.1	11.765.000.000,00	8.173.569.796,00	69,47	8.552.542.061,00
4	Pendapatan Restitusi Daerah	4.3.1.1.2	38.705.081.500,00	891.390.909,00	2,28	1.194.507.553,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.3.1.1.3	3.000.000.000,00	2.392.445.407,18	79,75	2.940.978.715,71
6	Pendapatan dari Zakat, Hibah dan Sumbangan Lain-lain	4.3.1.1.4	5.160.835.398,00	5.920.853.692,89	114,73	5.477.669.277,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.3.1.1.5	57.121.254.597,00	42.684.974.415,11	74,73	43.291.344.749,40
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		118.765.171.495,00	60.065.294.222,18	51,88	61.467.042.866,11
9	PENDAPATAN TRANSFER	4.5.1.2				
10	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA	4.5.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	4.3.1.2.1.1	19.819.703.572,00	11.983.302.750,00	60,46	13.994.033.050,00
12	Dana Bagi Hasil Pajak	4.3.1.2.1.2	6.569.241.117,00	3.423.798.414,00	52,12	2.122.838.529,00
13	Dana Abkhas Umum	4.3.1.2.1.3	58.428.842.000,00	58.428.842.000,00	100,00	594.675.376.000,00
14	Dana Abkhas Khusus	4.3.1.2.1.4	204.191.259.000,00	191.164.138.893,00	93,62	344.073.219.825,00
15	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		314.308.045.689,00	790.300.082.057,00	251,75	954.368.467.404,00
16	Transfer Pemerintah Provinsi	4.5.1.2.2				
17	Bagi Hasil Pajak	4.3.1.2.2.1	40.957.690.000,00	25.038.601.491,51	61,13	28.315.345.038,65
18	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	4.3.1.2.2.2	175.095.446.154,00	175.120.446.153,00	100,01	163.800.562.878,00
19	Bantuan Keuangan dari Provinsi Lainnya	4.3.1.2.2.3	9,00	9,00	100,00	9,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		216.055.186.154,00	200.189.047.644,51	92,64	192.118.907.916,65
21	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	4.5.1.2.3				
22	Pendapatan Hibah	4.3.1.2.3.1	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00	14.423.255.000,00
23	Dana Insentif Daerah	4.3.1.2.3.2	50.210.527.000,00	50.210.527.000,00	100,00	0,00
24	Dana Desa	4.3.1.2.3.3	286.814.473.000,00	286.814.473.000,00	100,00	225.023.540.000,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		555.025.000.000,00	555.025.000.000,00	100,00	259.446.795.000,00
26	Total Pendapatan Transfer		1.858.537.181.848,00	1.548.584.129.701,51	83,35	1.856.428.170.820,65
27	JUMLAH PENDAPATAN		1.499.642.568.888,00	1.404.087.868.928,69	93,61	1.447.885.212.676,76
28	BELANJA	4.4				
29	BELANJA OPERASI	4.4.1				
30	Belanja Pegawai	4.4.1.1	453.466.694.340,00	430.161.826.710,00	94,86	414.780.514.760,45
31	Belanja Barang dan Jasa	4.4.1.2	275.138.816.891,00	269.711.123.806,00	98,03	232.118.929.311,00
32	Belanja Hibah	4.4.1.3	20.501.021.850,00	17.248.015.167,00	84,13	86.072.304.342,00
33	Belanja Bantuan Sosial	4.4.1.4	1.034.437.000,00	943.989.600,00	91,26	0,00
34	Belanja Bantuan Keuangan	4.4.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jumlah Belanja Operasi		750.140.970.081,00	718.064.955.285,00	95,72	733.271.548.418,45
36	BELANJA MODAL	4.4.2				
37	Belanja Modal Tetap	4.4.2.1	6.830.000.000,00	5.278.121.104,00	77,28	9.690.765.055,00
38	Belanja Modal Perbaikan dan Meres	4.4.2.2	37.095.120.670,00	33.212.440.300,00	89,53	41.228.223.619,00
39	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.4.2.3	82.870.430.211,00	79.453.798.017,00	95,88	133.804.586.761,00
40	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.4.2.3	298.208.271.479,00	236.943.575.085,00	79,30	205.519.862.617,00
41	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.4.2.4	9.349.645.500,00	9.344.970.500,00	99,95	4.438.424.000,00
42	Jumlah Belanja Modal		454.354.471.860,00	364.285.905.006,00	80,18	394.681.862.052,00
43	BELANJA TAK TERDUGA	4.4.3				
44	Belanja Tak Terduga	4.4.3	12.238.001.000,00	12.238.001.000,00	100,00	7.025.000.000,00
45	Jumlah Belanja Tak Terduga		12.238.001.000,00	12.238.001.000,00	100,00	7.025.000.000,00
46	TRANSFER					
47	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	4.2.3				
48	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	4.2.3	345.774.323.000,00	249.254.208.200,00	72,09	298.691.594.000,00
49	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4.2.3	0,00	0,00	0,00	643.991.000,00
50	Jumlah Transfer		345.774.323.000,00	249.254.208.200,00	72,09	299.335.585.000,00
51	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS / (DEFISIT)		1.548.106.761.941,00	1.548.790.069.485,00	99,98	1.484.518.555.465,45
52			(48.464.408.605,00)	60.247.294.454,69	(189)	18.871.217.211,58
53	PEMBAYARAN	4.5				
54	PENERIMAAN PEMBAYARAN	4.5.1				
55	Penerimaan SILPA	4.5.1.1	33.464.408.603,00	33.464.408.603,12	100,00	34.347.508.897,79
56	Penerimaan Kembali Investasi Keuangan	4.5.1.2	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Jumlah Penerimaan Pembayaran		43.464.408.603,00	33.464.408.603,12	76,99	34.347.508.897,79
58	PENGELUARAN PEMBAYARAN	4.5.2				
59	Pembayaran Modal Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	14.423.255.000,00
60	Jumlah Pengeluaran Pembayaran		0,00	0,00	0,00	14.423.255.000,00
61	PEMBAYARAN NETTO		43.464.408.603,00	33.464.408.603,12	76,99	19.924.253.897,79
62	Koreksi SILPA		0,00	0,00	0,00	(31.062.506,00)
63	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	98.711.705.087,81		88.464.408.605,12

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Kebaya, 31 Desember 2017
BUPATI CEH TENGGARA

RAIDIN PINIM

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No	Uraian	Ref	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	4.3.1				
2	PENDAPATAN ASLI	4.3.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	4.3.1.1.1	11.715.000.000,00	9.382.128.114,00	80,09	8.173.569.798,00
4	Pendapatan Restribusi Daerah	4.3.1.1.2	2.115.081.500,00	1.102.718.785,00	52,14	881.390.909,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.3.1.1.3	3.000.000.000,00	2.603.653.511,00	86,79	2.392.445.407,18
6	Pendapatan dari Zakat, Infaq dan Shadaqah	4.3.1.1.4	6.539.933.747,00	6.982.044.930,00	106,76	5.920.833.692,89
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.3.1.1.5	50.538.480.100,00	60.192.930.932,42	119,10	42.684.974.413,11
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		73.908.495.347,00	80.263.476.272,42	108,60	60.053.234.222,18
9	PENDAPATAN TRANSFER	4.3.1.2				
10	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	4.3.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	4.3.1.2.1.1	10.808.954.000,00	7.143.182.712,00	66,09	11.983.302.750,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	4.3.1.2.1.2	3.492.088.000,00	5.016.740.377,00	143,66	3.423.798.414,00
13	Dana Alokasi Umum	4.3.1.2.1.3	586.091.423.000,00	586.439.180.343,00	99,94	584.228.842.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	4.3.1.2.1.4	199.342.084.000,00	151.157.752.221,00	75,83	191.164.138.833,00
15	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		799.734.549.000,00	743.756.855.653,00	93,00	790.800.082.057,00
16	Transfer Pemerintah Provinsi	4.3.1.2.2				
17	Bagi Hasil Pajak	4.3.1.2.2.1	42.186.386.458,00	28.400.840.397,73	67,32	25.038.601.491,51
18	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	4.3.1.2.2.2	-	-	-	175.120.446.133,00
19	Bantuan Keuangan dari Provinsi Lainnya	4.3.1.2.2.3	-	-	-	-
20	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		42.186.386.458,00	28.400.840.397,73	67,32	200.159.047.644,51
21	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	4.3.1.2.3				
22	Pendapatan Hibah	4.3.1.2.3.1	-	-	-	16.000.000.000,00
23	Dana Insentif Daerah	4.3.1.2.3.2	-	-	-	50.210.527.000,00
24	Dana Desa	4.3.1.2.3.3	252.238.604.000,00	252.238.604.000,00	100,00	286.814.473.000,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		252.238.604.000,00	252.238.604.000,00	100,00	353.025.000.000,00
26	Total Pendapatan Transfer		1.094.159.539.458,00	1.024.396.300.050,73	93,62	1.343.984.129.701,51
27	JUMLAH PENDAPATAN		1.168.068.034.805,00	1.104.659.776.323,15	94,57	1.404.037.363.923,69
28	BELANJA	4.4				
29	BELANJA OPERASI	4.4.1				
30	Belanja Pegawai	4.4.1.1	450.757.776.673,00	456.507.237.299,00	101,28	430.161.826.710,00
31	Belanja Barang dan Jasa	4.4.1.2	172.454.616.066,00	163.879.045.250,00	96,19	269.711.123.806,00
32	Belanja Hibah	4.4.1.3	1.656.000.000,00	895.000.000,00	54,05	17.248.015.167,00
33	Belanja Bantuan Sosial	4.4.1.4	644.437.000,00	643.990.200,00	99,93	943.989.600,00
34	Belanja Bantuan Keuangan	4.4.1.5	-	-	-	-
35	Jumlah Belanja Operasi		625.512.829.739,00	623.925.272.709,00	99,75	718.064.955.283,00
36	BELANJA MODAL	4.4.2				
37	Belanja Tanah	4.4.2.1	7.224.760.000,00	6.922.878.745,00	95,82	5.278.121.104,00
38	Belanja Peralatan dan Mesin	4.4.2.2	30.239.605.500,00	23.091.509.236,00	76,31	33.212.440.300,00
39	Belanja Gedung dan Bangunan	4.4.2.3	14.387.064.000,00	13.604.175.980,00	94,56	79.433.798.017,00
40	Belanja Jalan, Irigasi dan Jalinan	4.4.2.4	164.928.120.422,00	104.030.911.259,00	63,08	236.943.575.085,00
41	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.4.2.5	700.000.000,00	198.800.000,00	28,40	9.344.970.500,00
42	Jumlah Belanja Modal		217.499.849.922,00	147.848.275.220,00	67,98	364.232.905.006,00
43	BELANJA TAK TERDUGA	4.4.3				
44	Belanja Tak Terduga	4.4.3.1	11.300.000.000,00	11.300.000.000,00	100,00	12.238.001.000,00
45	Jumlah Belanja Tak Terduga		11.300.000.000,00	11.300.000.000,00	100,00	12.238.001.000,00
46	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	4.2.3				
47	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	4.2.3.1	403.341.675.200,00	400.132.218.800,00	99,20	249.254.208.200,00
48	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4.2.3.2	-	-	-	-
49	Jumlah Transfer		403.341.675.200,00	400.132.218.800,00	99,20	249.254.208.200,00
50	JUMLAH BELANJA		1.257.654.354.861,00	1.183.205.766.729,00	94,08	1.343.790.069.489,00
53	SURPLUS / DEFISIT		(89.586.320.056,00)	(78.545.990.405,85)	87,68	60.247.294.434,69
54	PEMBIAYAAN	4.5				
55	PENERIMAAN	4.5.1				
56	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	4.5.1.1	89.303.150.755,81	93.711.703.037,81	104,94	33.464.408.603,12
57	Penerimaan Kembali Investasi Keuangan	4.5.1.2	-	-	-	-
58	Jumlah Penerimaan		89.303.150.755,81	93.711.703.037,81	104,94	33.464.408.603,12
59	PENGELUARAN	4.5.2				
60	Penyertaan Modal (Investasi)	4.5.2.1	-	-	-	-
61	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
62	Pembayaran Netto		89.303.150.755,81	93.711.703.037,81	104,94	33.464.408.603,12
66	Koreksi SiLPA			46.752.668,00		
67	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			15.212.465.299,96		93.711.703.037,81

Kulacane, 31 Desember 2018
BUPATI ACEH TENGGARA,

RAIDIN PINIM



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.377.533.515.015,00	1.346.183.699.419,01	31.349.815.595,99	97,72
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.086.215.247,00	117.628.924.350,95	(7.542.709.103,95)	106,85
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	14.160.000.000,00	9.091.110.761,00	5.068.889.239,00	64,20
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.264.581.500,00	1.556.999.002,00	1.707.582.498,00	47,69
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.700.000.000,00	2.650.190.589,00	49.809.411,00	98,16
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89.961.633.747,00	104.330.623.998,95	(14.368.990.251,95)	115,97
1.2	DANA PERIMBANGAN	801.556.255.000,00	785.308.359.305,00	16.247.895.695,00	97,97
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.219.663.000,00	11.095.463.394,00	3.124.199.606,00	78,03
1.2.2	Dana Alokasi Umum	602.160.379.000,00	602.160.379.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	185.176.213.000,00	172.052.516.911,00	13.123.696.089,00	92,91
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	465.891.044.768,00	443.246.415.763,06	22.644.629.004,94	95,14
1.3.1	Pendapatan Hibah	23.570.896.550,00	0,00	23.570.896.550,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	28.965.222.548,00	29.891.490.093,06	(926.267.545,06)	103,20
1.3.4	Dana Penyesuaian, Dana Desa dan Otonomi Khusus	413.221.425.670,00	413.221.425.670,00	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	133.500.000,00	133.500.000,00	0,00	100,00
2	BELANJA	1.445.228.468.748,00	1.350.619.787.344,97	94.608.681.403,03	93,45
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	797.325.687.788,00	760.850.589.520,00	36.475.098.268,00	95,43
2.1.1	Belanja Pegawai	419.724.052.788,00	392.929.181.637,00	26.794.871.151,00	93,62
2.1.4	Belanja Hibah	13.530.500.000,00	11.638.470.200,00	1.892.029.800,00	86,02
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.269.437.000,00	3.240.919.883,00	28.517.117,00	99,13
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	348.801.698.000,00	341.817.086.800,00	6.984.611.200,00	98,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000,00	11.224.931.000,00	775.069.000,00	93,54
2.2	BELANJA LANGSUNG	647.902.780.960,00	589.769.197.824,97	58.133.583.135,03	91,03
2.2.1	Belanja Pegawai	89.718.103.500,00	59.537.898.825,00	30.180.204.675,00	66,36
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	307.945.534.464,00	300.590.675.343,00	7.354.859.121,00	97,61
2.2.3	Belanja Modal	250.239.142.996,00	229.640.623.656,97	20.598.519.339,03	91,77

LAMPIRAN 1 PENJAJARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


Halaman 1



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(67.694.953.733,00)	(4.436.087.925,96)	(63.258.865.807,04)	6,55
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	68.994.953.733,00	15.223.346.843,96	53.771.606.889,04	22,06
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.212.465.300,00	15.223.346.843,96	(10.881.543,96)	100,07
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	26.887.823.433,00	0,00	26.887.823.433,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	16.251.755.000,00	0,00	16.251.755.000,00	0,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Keuangan	10.642.910.000,00	0,00	10.642.910.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	67.694.953.733,00	13.923.346.843,96	53.771.606.889,04	20,57
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	9.487.258.918,00	(9.487.258.918,00)	0,00

Kutacane, 31 Desember 2019
BUPATI ACEH TENGGARA

H. RAIDIN PINIM


 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.332.292.824,072,00	1.323.614.177.534,67	8.678.646.537,33	99,35
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.055.201.992,00	98.346.791.414,67	(3.291.589.422,67)	103,46
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	11.012.100.000,00	7.430.830.729,00	3.581.269.271,00	67,48
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.535.081.500,00	1.476.594.784,00	58.486.716,00	96,19
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.730.386.745,00	2.730.386.745,00	0,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79.777.633.747,00	86.708.979.156,67	(6.931.345.409,67)	108,69
1.1.5	Pendapatan Zakat, Infaq dan Sadaqah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	756.971.879.537,00	747.479.922.589,00	9.491.956.948,00	98,75
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.993.235.537,00	11.601.726.533,00	3.991.509.004,00	74,40
1.2.2	Dana Alokasi Umum	550.539.093.000,00	546.648.237.000,00	3.890.856.000,00	99,29
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	190.839.551.000,00	189.229.959.056,00	1.609.591.944,00	99,16
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.265.742.543,00	477.787.463.531,00	2.478.279.012,00	99,48
1.3.1	Pendapatan Hibah	35.084.100.000,00	27.834.640.000,00	7.249.460.000,00	79,34
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.795.241.123,00	34.624.379.245,00	(8.829.138.122,00)	134,23
1.3.4	Dana Penyesuaian, Dana Desa dan Otonomi Khusus	303.233.404.000,00	303.233.404.000,00	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	116.152.997.420,00	112.095.040.286,00	4.057.957.134,00	96,51
2	BELANJA	1.388.237.394.610,00	1.326.679.156.593,18	61.558.238.016,82	95,57
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	794.820.486.180,00	762.873.073.903,00	31.947.412.277,00	95,98
2.1.1	Belanja Pegawai	397.109.833.672,00	379.871.132.575,00	17.238.701.097,00	95,66
2.1.4	Belanja Hibah	12.615.000.000,00	12.155.000.000,00	460.000.000,00	96,35
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.800.000.000,00	2.886.000.000,00	914.000.000,00	75,95
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Kepada Partai Politik	353.896.012.800,00	343.060.812.200,00	10.835.200.600,00	96,94
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	27.399.639.708,00	24.900.129.128,00	2.499.510.580,00	90,88
2.2	BELANJA LANGSUNG	593.416.908.430,00	563.806.082.690,18	29.610.825.739,82	95,01
2.2.1	Belanja Pegawai	98.496.500.520,00	98.366.066.462,00	130.434.058,00	99,87
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	291.237.336.792,00	277.339.058.897,38	13.898.277.894,62	95,23
2.2.3	Belanja Modal	203.683.071.118,00	188.100.957.330,80	15.582.113.787,20	92,35

LAMPIRAN I PENABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(55.944.570.538,00)	(3.064.979.058,51)	(52.879.591.479,49)	5,48
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.944.570.538,00	9.487.258.918,00	46.457.311.620,00	16,96
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	9.487.258.918,00	9.487.258.918,00	0,00	100,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.886.348.185,00	0,00	14.886.348.185,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Plutang Daerah	20.670.963.435,00	0,00	20.670.963.435,00	0,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Keuangan	10.900.000.000,00	0,00	10.900.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	55.944.570.538,00	9.487.258.918,00	46.457.311.620,00	16,96
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	6.422.279.859,49	(6.422.279.859,49)	0,00

Kutacane, 31 Desember 2020


BUPATI ACEH TENGGARA
H. RAIDIN PINIM

Laporan Pajak Kendaraan Bermotor

LAPORAN REKAP PENERIMAAN BBN & PKB
BERDASARKAN UPTD BAYAR
TANGGAL 1 JANUARI 2017 s/d 31 DESEMBER 2017

NO	JENIS KENDARAAN	BBN I		DENDA BBN I		BBN II		DENDA BBN II		PKB		DENDA PKB		DUPLIKAT	JUMLAH	
		UNT	RUPIAH	UNT	RUPIAH	UNT	RUPIAH	UNT	RUPIAH	UNT	RUPIAH	UNT	RUPIAH		UNT	RUPIAH
1	SEDAN	0	0	0	0	1	273	0	0	24	23,957,200	7	3,686,000	0	24	27,916,200
2	JEEP	8	333,348,000	0	0	3	5,329,500	1	1,126,320	124	235,844,600	43	12,578,100	2	126	588,226,520
3	MINIBUS	31	630,144,700	0	0	39	39,633,075	0	0	921	1,427,617,586	180	75,573,730	17	938	2,172,969,091
4	MICROBUS	0	0	0	0	1	1,322,800	0	0	8	11,005,700	3	2,727,260	0	8	15,055,760
5	BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PICKUP	24	311,053,100	0	0	11	9,905,000	2	134	474	761,341,887	130	74,035,574	7	481	1,156,469,561
7	LIGHT TRUCK	20	362,605,200	0	0	3	6,290,000	0	0	183	371,737,160	70	41,366,890	3	186	781,999,250
8	TRUCK	2	92,240,000	0	0	1	435	0	0	37	70,225,600	16	7,876,030	1	38	170,776,630
9	SEPEDA MOTOR R2	1,452	2,698,177,500	0	0	46	5,648,920	1	7,3	10,421	2,004,219,790	3,059	237,241,773	73	10,49	4,945,295,283
10	SEPEDA MOTOR R3	3	5,166,700	0	0	0	0	0	0	3	500,2	0	0	0	3	5,666,900
11	SEPEDA MOTOR (BECAK)	2	3,251,300	0	0	0	0	0	0	2	375,2	0	0	0	2	3,626,500
12	ALAT BERAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KENDARAAN KHUSUS	0	0	0	0	1	2,750,000	0	0	27	47,405,300	10	9,287,500	1	28	59,442,800
	TOTAL	1,542	4,435,986,500	0	0	106	71,587,295	4	1,267,620	12,224	4,954,230,223	3,518	464,372,857	104	12,33	9,927,444,495



NO	JENIS KENDARAAN	BBN I		DENDA BBN I		BBN II		DENDA BBN II		PKB		DENDA PKB		DUPLIKAT	JUMLAH	
		UNT	RUPIAH	UNT	RUPIAH	UNT	RUPIAH	UNT	RUPIAH	UNT	RUPIAH	UNT	RUPIAH		UNT	RUPIAH
1	SEDAN	0	0	0	0	1	1,189,500	0	0	19	19,944,300	3	327,1	0	19	21,460,900
2	JEEP	6	234,000,000	0	0	9	14,745,000	1	1,632,600	113	275,542,600	32	14,637,200	2	115	540,557,400
3	MINIBUS	60	991,823,400	0	0	59	67,468,500	9	1,225,900	993	1,717,220,914	204	39,035,322	13	1,006	2,816,774,036
4	MICROBUS	0	0	0	0	0	0	0	0	7	19,016,000	4	2,524,800	0	7	21,540,800
5	BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PICKUP	20	188,730,000	0	0	10	8,989,000	1	109	388	601,348,550	98	27,248,000	2	390	826,424,550
7	LIGHT TRUCK	6	92,902,500	0	0	9	12,112,600	3	198,3	171	420,754,000	69	28,878,770	6	177	554,846,170
8	TRUCK	2	46,665,000	0	0	0	0	0	0	39	86,070,300	20	3,356,200	1	40	136,091,500
9	SEPEDA MOTOR R2	1,703	2,332,960,100	0	0	50	6,044,300	8	233,3	9,39	1,984,477,195	2,321	109,227,870	51	9,441	4,432,942,765
10	SEPEDA MOTOR R3	11	11,686,700	0	0	0	0	0	0	11	1,252,300	0	0	0	11	12,939,000
11	SEPEDA MOTOR (BECAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	380,5	1	114,2	0	1	494,7
12	ALAT BERAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KENDARAAN KHUSUS	1	10,530,000	0	0	0	0	0	0	12	15,098,800	3	181,8	0	12	25,810,600
	TOTAL	1,809	3,909,297,700	0	0	138	110,548,900	22	3,399,100	11,144	5,141,105,459	2,755	225,531,262	75	11,219	9,389,882,421

Jumlah Pertumbuhan Kendaraan Bermotor

Tahun	Motor	Mobil	Jumlah	Pertumbuhan
2017	1.630	8.474	10.104	12,15%
2018	1.559	7.323	8.882	11,17%
2019	1.728	7.473	9.201	14,12%
2020	1.822	6.859	8.681	10,18%
2021	1.808	6.894	8.702	13,14%

